

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah sangat luas, tentunya setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Wilayah yang terbagi dalam pemerintah pusat dan pemeritan daerah yang harus saling bekerja sama. Suatu negara tentunya memiliki visi dan misi tersendiri. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut tentu perlu dibutuhkan adanya berbagai kebijakan dan progam pemerintahan sebagai wewenang dan pendelegasian yang tepat.

Setelah memasuki era reformasi yang dimualai pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju ke era keterbukaan. Dengan adanya era keterbukaan ini masyarakat semakin yakin atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan dapat menyampaikan aspirasi yang telah berkembang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan pemerintah (Yulianti, Hardi, & Rusli, 2014).

Salah satu wujud reformasi sektor publik yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan otonomi daerah sangatlah perlu dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, undang-undnag tersebut diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 tetang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tentang

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya undang-undang tersebut, telah mengubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban Pemerintah daerah dari pertanggungjawaban langsung kepada Pemerintah Pusat menjadi pertanggungjawaban yang diserahkan kepada masyarakat melalui DPRD.

Menurut (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2011) Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab kinerja badan atau hukum suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mampu memberikan informasi secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya sebagai pemberi informasi atas aktivitas atau kinerja keuangan (Yulianti, Hardi, & Rusli, 2014). Peraturan perundang undangan No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan tata pemerintah yang baik dan bertanggungjawab. Dengan adanya perundang undangan yang telah diatur sedemikian rupa tentu harapannya agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mewujudkan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ruang lingkup akuntabilitas wajib dipahami oleh seluruh instansi pemerintah yang meliputi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi suatu instansi sesuai dengan pokok dan fungsinya masing-masing. Penentuan akuntabilitas penyelenggaraan Negara dilihat pada setiap kegiatan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan Negara tersebut harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Dalam pelaksanaan akuntabilitas juga perlu memperhatikan berbagai hal yaitu anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan.

Anggaran merupakan salah satu elemen yang penting dalam sebuah organisasi guna melakukan perencanaan agar dapat melakukan pengendalian. Selain itu dalam ruang lingkup pemerintahan anggaran menjadi hal yang relevan karena akan berdampak pada akuntabilitas pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kejelasan sasaran anggaran menurut Yulianti,Hardi, & Rusli (2014) adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut mudah dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Jika sasaran anggaran itu jelas akan membantu aparat pelaksanaan anggaran dalam perealisasinya, maka dengan begitu secara tidak langsung akan memengaruhi kinerja aparat.

Sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi merupakan prosedur yang menggunakan informasi yang berguna untuk mengubah dan menjaga pola aktivitas organisasi. Selaku pengelola dana publik pemerintah daerah mampu menyediakan informasi keuangan yang di perlukan secara akurat, konsisten, tepat waktu, relevan dan dapat dipercaya itu semua dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik.

Penggunaan pengendalian akuntansi untuk memastikan pencatatan apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku pada setiap transaksi keuangan secara

akurat dan dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam pencatatan ( Zakiyudin & Suyanto, 2015). Seorang manager dalam menentukan keputusan keputusan yang baik perlu penggunaan sistem pengendaliam akuntansi karena dengan itu mampu mengontrol oprasi-oprasi secara efektif dan mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas tertentu dalam memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Sistem pelaporan seringkali disebut juga dengan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang mengukur setiap pusat pertanggungjawaban dan membandingkan hasil-hasil tersebut dengan hasil yang diharapkan atau dianggarkan (Hansen & Mowen, 2015). Diperlukannya sistem pelaporan yang baik dalam suatu organisasi agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajemen dalam mengimplentasikan anggaran yang telah ditetapkan. Kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi keuangan dan infromasi lainnya dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak berkepentingan ( Zakiyudin & Suyanto, 2015).

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan (Yulianti, Hardi, & Rusli, 2014) menggunakan variabel independen kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan istem pelapora dan variabel dependen akuntabilitas kinerja pemerintah. Hasil dari penelitian ini bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh positif sedangkan pengendalian akuntansi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama, Agustin & Taqwa (2019) tentang pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Padang. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak tergantung pada kepada kejelasan sasaran yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriana, Hidayati dan Mawardi (2018) tentang kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Situbondo, dari pengujian secara simultan hasilnya berpengaruh signifikan. Hasil penelitian secara parsial kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Sedangkan secara parsial variabel pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Zakiyudin dan Suyanto (2015) yang menggunakan variabel independen kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Inspektorat Jendral Kementrian Agama RI. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fitriana, Hidayati dan Mawardi (2018) dan Pratama, Agustin & Taqwa (2019) perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah populasi dari penelitian ini. Penelitian sebelumnya dilakukan pada Satuan Kerja Daerah Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Padang. Sedangkan penelitian ini akan dilakukan pada SKPD Kota Semarang. Dalam penelitian ini juga ingin mengetahui apakah akan berpengaruh dengan menggunakan variabel yang sama juga namun dengan daerah yang berbeda. Karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang layak untuk diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang ?
2. Apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang ?
3. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang
2. Untuk mengetahui apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang
3. Untuk mengetahui apakah Sistem Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh penulis :

1. Aspek teoritis  
Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai informasi dalam penelitian selanjutnya
2. Aspek praktis
  - a. Bagi pemerintahan dengan adanya penelitian ini dirapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, selain itu dapat dijadikan bahan masukan untuk mengevaluasi kinerja instansi-instansi serta memahami pentingnya akuntabilitas kinerja.
  - b. Bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui kinerja dari pemeirintah daerah.